

TRANSFORMASI KURIKULUM PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DI INDONESIA (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Menuju Kurikulum 2013 Hingga Kurikulum Ganda)

Andi Prastowo

Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

anditarbiyah@gmail.com

Abstrak

Kurikulum idealnya adaptif dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Tujuannya agar luaran pendidikan memiliki kemampuan yang relevan dengan kebutuhan pengguna dan tantangan zaman. Transformasi kurikulum menjadi hal yang biasa terjadi di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Namun, mulai tahun 2015, transformasi kurikulum sekolah dan madrasah di Indonesia dilaksanakan dengan menerapkan dua kurikulum sekaligus, yakni kurikulum 2013 dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Hal ini jarang terjadi pada masa-masa sebelumnya. Berangkat dari persoalan tersebut, artikel ini berupaya mengungkap tentang latar belakang dan strategi serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan transformasi kurikulum pendidikan dasar dan menengah di Indonesia menuju kurikulum ganda. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi atau perubahan kurikulum di Indonesia dari KTSP menjadi Kurikulum 2013, kemudian kurikulum ganda adalah karena mutu pendidikan nasional yang masih rendah. Penerapan kurikulum ganda dilaksanakan sejak tahun 2015 dengan menggunakan Kurikulum 2013 dan KTSP sekaligus untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kebijakan ini dilakukan karena berbagai persoalan teknis implementasi kurikulum 2013.

Kata kunci: transformasi kurikulum, pendidikan dasar, kurikulum 2013, kurikulum ganda

A. PENDAHULUAN

Perubahan kurikulum di sekolah atau madrasah bukan hal yang asing lagi dalam dunia pendidikan. Dalam sejarah pendidikan dasar dan menengah di Indonesia, sekurang-kurangnya 10 macam kurikulum yang pernah digunakan. Adapun kesepuluh macam kurikulum tersebut, dari era pasca kemerdekaan hingga kurikulum yang diberlakukan saat ini terdiri dari: *pertama*, rencana pelajaran 1947; *kedua*, kurikulum 1952; *ketiga*, kurikulum 1964; *keempat*, kurikulum 1968; *kelima*, kurikulum 1975/1976; *keenam*, kurikulum 1984; *ketujuh*, kurikulum 1994; *kedelapan*, kurikulum 2002 dan 2004; *kesembilan*, kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) 2006; dan *kesepuluh*, kurikulum 2013. Dengan kata lain, perubahan kurikulum di Indonesia bukanlah sesuatu yang aneh dan merupakan sesuatu yang wajar. Sholeh Hidayat menyebut perubahan tersebut merupakan konsekuensi dan implikasi dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Hidayat, 2013:1).

Perubahan kurikulum dalam konteks pendidikan merupakan suatu keniscayaan. Karena pendidikan tidak bisa teralienasi dengan konteks sosial, budaya, dan masyarakat yang mengitarinya. Apalagi menurut Tilaar, tidak ada suatu masyarakat yang tidak berubah (Tilaar, 2012:14). Oleh karena itu, kurikulum pendidikan tidak mungkin tidak harus selalu beradaptasi dengan perkembangan lingkungan sekitarnya. Jadi jika lingkungan konteks politik, sosial, budaya, ekonomi, dan ilmu pengetahuan di masyarakat telah berubah maka kurikulum pendidikan pun harus berubah. Jika kurikulum pendidikan tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan sosial, budaya dan masyarakatnya maka *output* pendidikan pun tidak akan memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini bisa berdampak buruk bagi kelangsungan lembaga pendidikan di masa yang akan datang. Apalagi lembaga pendidikan membutuhkan *input* dari masyarakat dan masyarakat pula sebagai pengguna *output* lembaga pendidikan. Jika kondisi tersebut yang terjadi, yakni lembaga pendidikan tidak memiliki peran dan fungsi sosial lagi di masyarakatnya maka ia tidak akan digunakan oleh masyarakat. Artinya jika hal tersebut terjadi maka habislah masa depan lembaga pendidikan tersebut. Seperti dikatakan Tilaar;

Apabila program kurikulum di dalam sistem persekolahan (*scholing*) bersifat statis, maka ini artinya program tersebut dan *output* dari program tersebut akan termarginalisasi dari kehidupan yang nyata atau kebudayaan yang hidup. Kecuali, apabila program persekolahan tersebut merupakan kepanjangan dari sistem kekuasaan yang berlaku yang tidak mengakui kebebasan dan otonomi individu serta otoriter maka program kurikulum persekolahan akan menjadi sangat dominan namun tidak akan membawa kepada proses kematangan individu justru sebaliknya proses pembodohan individu. (Tilaar, 2012:362) Untuk itu, kurikulum, sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Presiden RI, UU No. 20 Tahun 2003), harus terus melakukan penyesuaian dan adaptasi dengan perubahan politik, ekonomi, sosial, budaya dan ilmu pengetahuan dan teknologi secara periodik dan berkelanjutan.

Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional, menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (9) kurikulum dipahami sebagai, “seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”. Dari pengertian tersebut, menurut Sholeh Hidayat (2013:2-3) mengandung sejumlah implikasi sebagai berikut: *pertama*, tafsiran tentang kurikulum bersifat luas, tidak hanya sekesar mata pelajaran (*courses*) tetapi meliputi semua kegiatan dan pengalaman yang menjadi tanggungjawab sekolah atau madrasah; *kedua*, tidak ada pemisahan antara kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler - semuanya tercakup dalam pengertian kurikulum); *ketiga*, pelaksanaan kurikulum tidak hanya dibatasi pada keempat dinding kelas saja, melainkan dilaksanakan dalam dan di luar kelas sesuai tujuan atau

kompetensi yang hendak dicapai; *keempat*, faktor peserta didik menjadi pertimbangan dalam menentukan strategi dan metode pembelajaran - dimungkinkan guru menggunakan berbagai variasi metode pembelajaran dan berbagai media pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi; dan *kelima*, tujuan pendidikan bukan menyampaikan mata pelajaran (*courses*) melainkan pengembangan pribadi peserta didik dan belajar cara hidup dalam masyarakat atau pembinaan pribadi peserta didik secara utuh, dan ini dicapai melalui kurikulum sekolah dan madrasah. Dengan demikian, kurikulum adalah isi dari kegiatan pembelajaran yang berupa pengalaman belajar yang mempertimbangkan perkembangan peserta didik agar dapat tercapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan.

Seperti dalam kebijakan kurikulum terbaru, yaitu Kurikulum 2013, bagi Muhammad Nuh, perubahan dan pengembangan kurikulum ini merupakan persoalan yang sangat penting, karena kurikulum harus senantiasa disesuaikan dengan tuntutan zaman. Kemudian, diperkuat dengan beberapa hasil studi internasional tentang kemampuan peserta didik Indonesia dalam kancah internasional yang selalu pada posisi rendah atau bahkan sangat rendah (Mulyasa, 2013:60), semakin memperkuat ambisi pemerintah untuk menyegerakan perubahan dan pengembangan Kurikulum 2013. Padahal tidak pernah ditemukan dan diungkap tentang studi atau hasil evaluasi yang teliti tentang sejauh mana kualitas implementasi kurikulum sebelumnya.

Selanjutnya, tepat mulai bulan Juli 2013, Kurikulum 2013 dilaksanakan di kelas I, IV, VII, dan X di sejumlah sekolah yang telah ditentukan sebagai rintisan implementasi kurikulum tersebut (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemendikbud, 2013:3). Sedangkan implementasi Kurikulum 2013 di madrasah sesuai Surat Edaran Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia No. SE/Dj.I/PP.00/50/2013 (Dirjen Pendis Kemenag RI, 2013) yang ditandatangani Dirjen Pendis pada tanggal 8 Juli 2013 dengan mempertimbangkan persiapan personel dan kesiapan anggaran di Kementerian Agama baru dimulai pada tahun pelajaran 2014/2015 khusus untuk kelas I, IV, VII, dan X saja.

Berangkat dari berbagai pemikiran dan analisis awal tersebut, makalah ini berusaha mengurai pokok masalah dari kontroversi perubahan kurikulum dari KTSP ke Kurikulum 2013 yang kemudian berubah lagi dengan kebijakan kurikulum ganda, yakni Kurikulum 2013 dan KTSP yang digunakan secara bersamaan, sekaligus mencari alternatif solusi terbaik khususnya bagi pengembangan dan perubahan kurikulum pendidikan dasar dan menengah ke depan dan umumnya untuk peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Adapun beberapa pertanyaan yang menjadi pokok masalah yang kemudian akan diuraikan lebih lanjut

pada segmen berikutnya, yaitu: *pertama*, mengapa perlu dilakukan perubahan terhadap Kurikulum 2006 atau KTSP?; *kedua*, bagaimanakah strategi pelaksanaan implementasi Kurikulum 2013?; *ketiga*, seperti apakah kontroversi yang terjadi terhadap perubahan Kurikulum 2013?; *keempat*, bagaimanakah gambaran kebijakan perubahan kurikulum yang solutif dan komprehensif

B. PEMBAHASAN

1. Perlunya Perubahan terhadap Kurikulum 2006

Wacana pengembangan kurikulum baru, sebagai pengganti Kurikulum 2006 (KTSP), sebenarnya mulai terasa sejak maraknya fenomena tawuran pelajar, perilaku asusila, dan kecurangan dalam ujian yang dilakukan sejumlah kalangan pelajar di beberapa daerah di Indonesia pada tahun 2011-2012. Kondisi tersebut telah meresahkan berbagai kalangan masyarakat sehingga kemudian masyarakat mulai mempertanyakan tentang peran dan fungsi sekolah dan madrasah selama ini. Berangkat dari keresahan tersebut lahirlah program pendidikan karakter yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendikbud – saat ini) pada tahun 2011. Melalui Pusat Kurikulum pada Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendiknas menerbitkan buku pedoman untuk pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah dan madrasah yang berjudul “Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa: Pedoman Sekolah”. Dari buku tersebut disajikan materi pendidikan karakter yang mencakup 18 aspek, yaitu: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggungjawab (Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendiknas, 2011).

Namun, persoalannya bukan sekedar degradasi moral saja, dari hasil survei berbagai lembaga survei internasional menunjukkan bahwa prestasi peserta didik Indonesia dalam kancah internasional tertinggal dan terbelakang. Seperti hasil survei dari TIMS tahun 2009 menunjukkan bahwa hanya 5% peserta didik Indonesia yang mampu mengerjakan soal penalaran berkategori tinggi, padahal peserta didik Korea mampu mencapai 71 %. Data lain juga menunjukkan hal serupa, hasil stud PISA tahun 2009 menempatkan Indonesia pada peringkat 10 besar dari total 65 negara peserta PISA. Hal itu dikarenakan peserta didik Indonesia ternyata cuma mampu menguasai materi pelajaran sampai level ketiga, padahal peserta didik di banyak negara lain mampu menguasai materi pelajaran sampai level 5, bahkan 6 (Mulyasa, 2013:60).

Belum lagi dari aspek *Human Index Development* (HDI), peringkat Indonesia yang mengalami penurunan sejak 1995, yaitu peringkat ke 104 pada tahun 1995, 109 pada tahun 2000, ke-110 pada tahun 2002, ke-112 pada tahun 2003, dan sedikit membaik pada peringkat ke-111 pada tahun 2004 dan peringkat 110 pada tahun 2005. Pada tahun 2007, peringkat IPM Indonesia mengalami kenaikan sedikit yaitu peringkat ke 107, akan tetapi masih di bawah sejumlah negara di kawasan negara-negara ASEAN seperti Vietnam (105), Filipina (90), Thailand (78), Malaysia (63), Brunei Darussalam (30), dan Singapura (25) (Ali, 2009:28).

Mulyasa mengatakan bahwa untuk berbagai kepentingan tersebut diperlukan perubahan yang cukup mendasar dalam sistem pendidikan nasional. Perubahan tersebut berkaitan erat dengan kurikulum, yang dengan sendirinya menuntut dan mempersyaratkan berbagai perubahan pada komponen-komponen pendidikan lain. Dalam hal tersebut (perubahan kurikulum), berbagai pihak menganalisa dan melihat perlunya diterapkan kurikulum berbasis kompetensi sekaligus berbasis karakter (*competency and character based curriculum*) yang dapat membekali peserta didik dengan sikap dan kemampuan yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan tuntutan teknologi. Karena itu langkah yang positif ketika tahun 2012 pemerintah mulai mengembangkan dan melakukan uji publik terhadap Kurikulum 2013 dan kemudian menerapkannya mulai bulan Juli 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang dikembangkan berbasiskan karakter dan kompetensi yang diharapkan mampu menghasilkan insan yang produktif, kreatif, inovatif dan berkarakter (Mulyasa, 2013:4-7).

Di samping itu, berdasarkan hasil telaah pemerintah terhadap implementasi KTSP ditemukan adanya beberapa kesenjangan dalam kurikulum tersebut. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang berlangsung cepat dalam era global dewasa ini, dapat diidentifikasi beberapa kesenjangan kurikulum tersebut sebagai berikut (Mulyasa, 2013:61-63):

Kondisi Saat Ini (KTSP)		Konsep Ideal	
A. Kompetensi Lulusan		A. Kompetensi Lulusan	
1	Belum sepenuhnya menekankan pendidikan	1	Berkarakter mulia
2	Belum menghasilkan keterampilan sesuai kebutuhan	2	Keterampilan yang relevan
3	Pengetahuan-pengetahuan lepas	3	Pengetahuan-pengetahuan terkait
B. Materi Pembelajaran		B. Materi Pembelajaran	
1	Belum relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan	1	Relevan dengan materi yang dibutuhkan

2	Beban belajar terlalu berat	2	Materi esensial
3	Terlalu luas, kurang mendalam	3	Sesuai dengan tingkat perkembangan anak
C. Proses Pembelajaran		C. Proses Pembelajaran	
1.	Berpusat pada guru	1.	Berpusat pada peserta didik
2.	Proses pembelajaran berorientasi pada buku teks	2.	Sifat pembelajaran yang kontekstual
3.	Buku teks hanya memuat materi bahasan	3	Buku teks memuat materi dan proses pembelajaran, sistem penilaian serta kompetensi yang diharapkan
D. Penilaian		D. Penilaian	
1.	Menekankan aspek kognitif	1.	Menekankan aspek kognitif, afektif, psikomotorik secara proporsional
2.	Tes menjadi cara penilaian yang dominan	2.	Penilaian tes pada portofolio saling melengkapi
E. Pendidik dan Tenaga Kependidikan		E. Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
1.	Memenuhi kompetensi profesi saja	1.	Memenuhi ometensi profesi, pedagogi, sosial, dan personal
2.	Fokus pada ukuran kinerja	2.	Motivasi mengajar
F. Pengelolaan Kurikulum		F. Pengelolaan Kurikulum	
1.	Satuan pendidikan mempunyai pembebasan dalam pengelolaan kurikulum	1.	Pemerintah pusat dan daerah memiliki kendali kualitas dalam pelaksanaan kurikulum di tingkat satuan pendidikan
2.	satuan pendidikan, kebutuhan peserta didik, dan potensi daerah	2.	Satuan pendidikan mampu menyusun kurikulum dengan mempertimbangkan kondisi satuan pendidikan, kebutuhan peserta didik, dan potensi daerah
3.	Pemerintah hanya menyiapkan sampai standar isi mata pelajaran	3.	Pemerintah menyiapkan semua komponen kurikulum sampai buku teks dan pedoman

Karena KTSP 2006 dinilai mengandung berbagai persoalan dari persoalan yang substansial hingga ke persoalan teknis oleh karena itu diperlukan pengembangan kurikulum baru dengan penyempurnaan sejumlah pola pikir, yaitu Kurikulum 2013. Dengan kata lain penggantian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah dengan Kurikulum 2013 menjadi suatu keniscayaan. Karena melalui pengembangan Kurikulum 2013 diharapkan dapat dihasilkan insan Indonesia yang: produktif, kreatif, inovatif, afektif; melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi.

2. Kebijakan Implementasi Kurikulum 2013

Menurut pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh, perubahan dan pengembangan kurikulum (Kurikulum 2013) merupakan persoalan yang sangat penting, karena harus senantiasa disesuaikan dengan tuntutan zaman (Mulyasa, 2013:60). Selain itu, juga karena adanya temuan bahwa kurikulum sebelumnya (KTSP) ternyata banyak kelemahan dalam implementasi di sekolah dan madrasah. Begitupula problem yang dihadapi bangsa Indonesia yang semakin kompleks terutama yang melibatkan pelajar dan mahasiswa seperti perkelahian pelajar, perjudian, penyalahgunaan obat terlarang, narkoba, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), plagiarisme, kebocoran dan berbagai kecurangan dalam ujian sehingga membutuhkan perubahan sistem pendidikan secara mendasar. Faktor lainnya, yaitu berbagai masalah dan tantangan masa depan yang semakin lama semakin rumit dan kompleks. Berbagai tantangan masa depan tersebut antara lain berkaitan dengan globalisasi dan pasar bebas, masalah lingkungan hidup, pesatnya kemajuan teknologi informasi, konvergensi ilmu dan teknologi, ekonomi berbasis pengetahuan, kebangkitan industri kreatif dan budaya, pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosains, mutu, investasi dan transformasi pada sektor pendidikan, serta materi TIMSS dan PISA yang harus dimiliki oleh peserta didik (Mulyasa, 2013:60-64). Semuanya itulah mendorong pengembangan kurikulum baru, Kurikulum 2013, yang dinilai akomodatif, solutif dan antisipatif terhadap berbagai problem, kebutuhan, dan tantangan di masyarakat baik pada masa kini maupun di masa yang akan datang. Selaras dengan penjelasan Kunandar yang menyatakan bahwa Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia (Kunandar, 2013:16).

Kurikulum 2013 dikembangkan dengan penyempurnaan sejumlah pola pikir, yaitu: *pertama*, pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran berpusat pada peserta didik. untuk memiliki kompetensi yang sama; *kedua*, pola pembelajaran satu arah (interaksi guru-peserta didik) menjadi pembelajaran interaktif (interaktif guru-peserta didik-masyarakat-lingkungan alam, sumber atau media lainnya); *ketiga*, pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara jejaring (peserta didik dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang dapat dihubungi serta diperoleh melalui internet); *keempat*, pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif-mencari (pembelajaran siswa aktif mencari semakin diperkuat dengan model pembelajaran pendekatan sains); *kelima*, pola belajar sendiri menjadi belajar kelompok (berbasis tim); *keenam*, pola pembelajaran alat tunggal menjadi

pembelajaran berbasis alat multimedia; *ketujuh*, pola pembelajaran berbasis massal menjadi kebutuhan pelanggan (*users*) dengan memperkuat pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap peserta didik; *kedelapan*, pola pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal (*monodiscipline*) menjadi pembelajaran ilmu pengetahuan jamak (*multidisciplines*); dan *kesembilan*, pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran kritis (Kunandar, 2013:23-24).

Empat prinsip yang digunakan dalam pengembangan Kurikulum 2013, yaitu: *pertama*, bahwa sekolah adalah satu kesatuan lembaga pendidikan dan kurikulum adalah kurikulum satuan pendidikan, bukan daftar mata pelajaran; *kedua*, guru di satu satuan pendidikan adalah satu satuan pendidik (*community of educators*), mengembangkan kurikulum secara bersama-sama; *ketiga*, pengembangan kurikulum di jenjang satuan pendidikan dipimpin langsung oleh kepala sekolah; dan *keempat*, pelaksanaan implementasi kurikulum di satuan pendidikan dievaluasi oleh kepala sekolah (Majid, 2014:19).

Dengan sejumlah landasan konseptual, empiris, dan prinsip pengembangan kurikulum tersebut, Kurikulum 2013 memiliki karakteristik sebagai berikut (Kunandar, 2013:24-25; Prastowo, 2015:6-7)

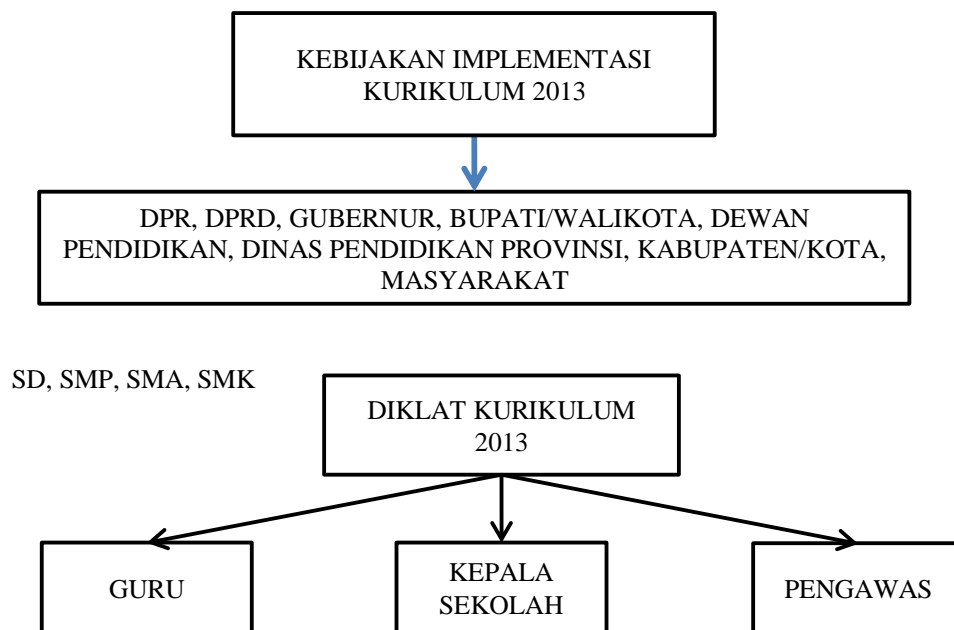
- a. Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik.
- b. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar.
- c. Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat.
- d. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- e. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran.
- f. Kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi (*organizing elements*) kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti.
- g. Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat (*reinforced*) dan memperkaya (*enriched*) antarmata pelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal).

Sementara itu, perubahan utama Kurikulum 2013 dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, KTSP 2006, meliputi empat elemen utama. Secara umum, elemen

perubahan dalam Kurikulum 2013 tersebut meliputi: *pertama*, standar kompetensi lulusan; *kedua*, standar proses; *ketiga*, standar isi; dan *keempat*, standar penilaian. Selanjutnya, karena perubahan ini maka diperlukan sejumlah persiapan yang harus dilakukan oleh tiap-tiap pengelola satuan pendidikan, dari mulai kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan (Majid, 2014:35).

Kemudian, untuk Kurikulum 2013 implementasinya dilakukan dengan strategi bertahap seperti berikut ini. Pada *tahap pertama*, Kurikulum 2013 dilaksanakan mulai Juli 2013 khusus untuk kelas I, IV, VII dan X; *tahap kedua*, dilaksanakan mulai Juli 2014 untuk kelas I, II, IV, VII, VIII, X, dan XI; dan *tahap ketiga*, dilaksanakan Juli 2015 untuk kelas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan XII (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemendikbud, 2013:3). Jadi pada tahun 2015, target awalnya semua sekolah-sekolah di bawah naungan Kemendikbud direncanakan sudah melaksanakan Kurikulum 2013 (Prastowo, 2015:8).

Sedangkan menurut Surat Edaran Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia No. SE/Dj.I/PP.00/50/2013 yang ditandatangani Dirjen Pendis pada tanggal 8 Juli 2013 yang menetapkan bahwa pelaksanaan implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah baru dimulai pada tahun pelajaran 2014/2015. Untuk tahun tersebut, implementasi kurikulum 2013 direncanakan akan dilaksanakan hanya untuk kelas I, IV, VII, dan X. Sedangkan pada tahun 2013/2014, Kementerian Agama baru melakukan persiapan implementasi kurikulum 2013 dalam bentuk pelatihan kepala madrasah, pengawas madrasah, pendidik serta pengadaan bahan ajar dan buku pedoman guru (suara pembaruan.com, 2013; Prastowo, 2015:9). Untuk skema strategi implementasi kurikulum 2013 dapat dilihat seperti pada Gambar 1 berikut ini.

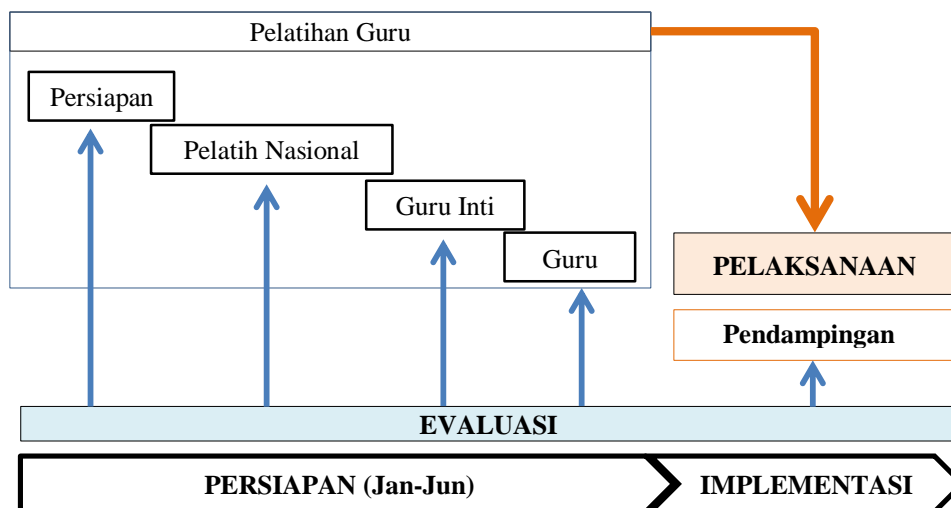


Gambar 1

Strategi Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013

(Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemendikbud, 2013:5)

Gambar 1 di atas menjelaskan bahwa implementasi kurikulum adalah usaha bersama antara Pemerintah dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota (Prastowo, 2015:9). Rangkaian implementasi Kurikulum 2013 dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Skema untuk rencana implementasi Kurikulum 2013 dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini.



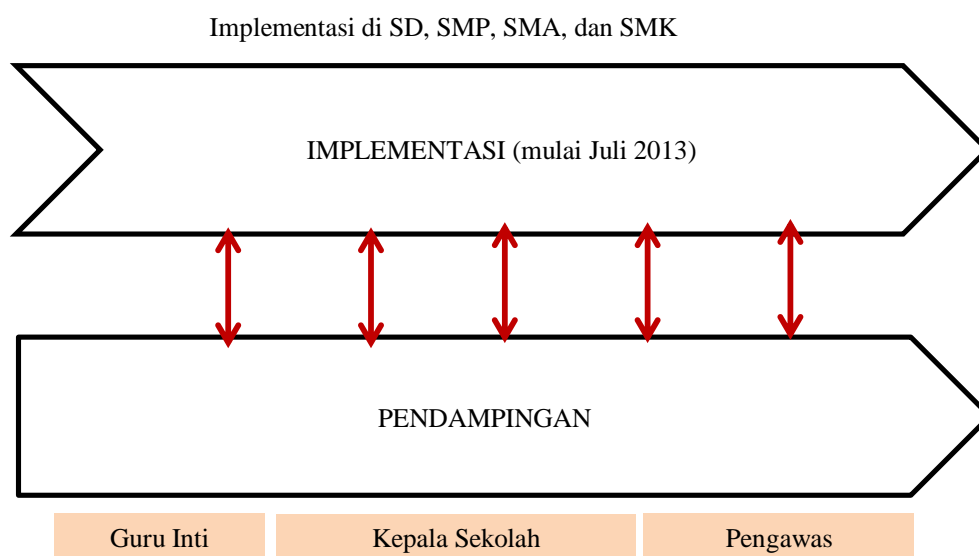
Gambar 2

Rencana Implementasi Kurikulum 2013

(Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemendikbud, 2013:6)

Dari Gambar 2 di atas dapat dijelaskan bahwa implementasi Kurikulum 2013 pada tahap pertama terbagi menjadi dua fase, yaitu fase persiapan dan fase implementasi. Pada fase persiapan ini pemerintah melakukan pelatihan kepada guru yang terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu pelatihan bagi pelatih nasional, pelatihan bagi guru inti, dan pelatihan kepada guru (suarapembaruan.com, 2014; Prastowo, 2015:11).

Proses pelaksanaan implementasi 2013 melibatkan berbagai pihak agar dapat terlaksana sesuai tujuan. Skema proses tersebut dapat dilihat pada Gambar 3 berikut ini.



Gambar 3

Proses Pelaksanaan Kurikulum 2013

(Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemendikbud, 2013:7)

Dari Gambar I.3 di atas dapat diketahui bahwa dalam tahap pelaksanaan Kurikulum 2013, sejumlah sekolah sasaran dari semua jenjang secara terbatas mulai bulan Juli 2013 sudah menggunakan kurikulum baru ini. Untuk madrasah, Kurikulum 2013 baru dilaksanakan mulai bulan Juli 2014. Dalam proses pelaksanaan kurikulum baru ini, para guru sebagai ujung tombak dari pelaksanaan kurikulum ini mendapatkan pendampingan dari sejumlah pihak, yaitu meliputi: guru inti, kepala sekolah, dan pengawas. Dengan pendampingan ini diharapkan pelaksanaan kurikulum 2013 dapat terlaksana sesuai tujuan yang diharapkan (Prastowo, 2015:11).

3. Kontroversi Kurikulum 2013 dan Pemberlakuan Kurikulum Ganda: Solusi yang Bermasalah

Dalam sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia, Winarno Surakhmad (2009:66) mengamati bahwa setiap kali pengembangan kurikulum baru selalu menyebabkan lahirnya kondisi yang problematis. Begitu pula ketika kurikulum baru diperkenalkan kepada masyarakat segera lahir berbagai kritik yang menggambarkan ketidakpuasan, terutama pengguna jasa pendidikan. Di satu pihak, kata Surakhmad (2009:77), “kita merasa ‘terhibur’ karena respons itu mungkin menggambarkan semakin tebalnya kepedulian, tingginya dinamika, dan meningkatnya aspirasi masyarakat terhadap pendidikan. Di lain pihak, kita harus merasa cemas karena gejala itu mungkin menggambarkan perubahan kurikuler sejauh itu masih belum mampu menjawab aspirasi masyarakat”. Apakah yang terjadi dengan kasus Kurikulum 2013 juga demikian? Untuk menjawab pertanyaan ini perlu ditelusuri bagaimana realitas persoalan yang dihadapi praktisi di sekolah dan madrasah dalam penerapan kurikulum tersebut, sekaligus bagaimana opini masyarakat (sebagai pengguna jasa pendidikan) mengenai keberadaan Kurikulum 2013 tersebut. Berikut ini diuraikan beberapa kontroversi tentang penerapan Kurikulum 2013 di lapangan sekaligus berbagai persoalannya.

Doni Koesoema A (2014) menyebutkan bahwa persoalan yang dihadapi Kurikulum 2013 tidak sekedar persoalan teknis semata, tetapi persoalan substantif. Inilah yang menurutnya menjadi alasan yang kuat bagi pemerintah harus merevisi Kurikulum 2013. Melalui tulisannya yang berjudul “Merevisi Kurikulum 2013” Doni Koesoema A menyebut 10 fokus persoalan substantif dalam kurikulum pengganti KTSP tersebut. Kesepuluh persoalan substantif tersebut terdiri dari: *pertama*, revisi konsep Kompetensi Inti yang terlalu mereduksi kekayaan kompleksitas proses belajar yang sesungguhnya; *kedua*, pengarusutamaan pada spiritualisme yang menjadikan Kurikulum 2013 sangat absurd, memiskinkan pengalaman belajar, dan mendiskriminasi peserta didik yang agamanya tidak resmi diakui oleh pemerintah; *ketiga*, penggabungan pendidikan agama dan budi pekerti, padahal keduanya memiliki domain yang berbeda; *keempat*, silabus memiliki logika yang terbalik; *kelima*, pendekatan tematik integratif berubah menjadi materi pelajaran; *keenam*, silabus dalam Kurikulum 2013 tidak menyertakan peta kompetensi dasar, padahal peta kompetensi dasar menjadi rujukan untuk mengetahui sejauh mana proses belajar peserta didik, dan apakah seluruh kompetensi keilmuan yang dibutuhkan telah terliput dalam keseluruhan tema pembelajaran; *ketujuh*, penyusunan kompetensi dasar dan indikator dalam Kurikulum 2013 masih terlalu umum, padahal untuk dapat dinilai indikator harus detail dan terperinci; *kedelapan*, model evaluasi pembelajaran baik secara mikro maupun makro sangat bermasalah dan tidak realistis; *kesembilan*, model pelatihan guru harus diubah, tidak sekedar paparan presentasi *power point* yang terjadi selama ini, tetapi

dengan *micro teaching*; dan *kesepuluh*; kualitas desain buku pelajaran yang perlu dipertanyakan kualitasnya baik dari segi isi maupun substansinya.

Problematika dan kontroversi implementasi Kurikulum 2013, bukan sekedar persoalan teknis, seperti pengadaan buku, pelatihan guru, kepala sekolah, dan pengawas, dan lain sebagainya, tetapi juga menyangkut persoalan fundamental dan substansial, baik asumsi, argumentasi, substansi, dan implementasinya yang tak berjalan koheren. Namun, mengganti dan mengubah kurikulum yang baru diimplementasikan juga bukan persoalan yang mudah dan selalu solutif. Oleh karena itu, kebijakan meneruskan Kurikulum 2013 secara terbatas pada 6.221 sekolah dan menggunakan kembali KTSP 2006 pada sekolah dan madrasah lainnya merupakan pilihan yang bijak meskipun momennya yang menguntungkan. Meskipun demikian, kebijakan kurikulum ganda juga bukan solusi final karena juga menyisakan beragam persoalan baru. Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai problem tersebut maka hendaknya kurikulum diletakkan sebagaimana fungsi dan perannya dalam sistem pendidikan. Seperti diungkapkan Winarno Surakhmad (2009:67), peningkatan kualitas harus melibatkan perubahan sejumlah unsur determinan keberhasilan, tidak terpadu hanya pada perubahan kurikulum semata.

4. Kebijakan Perubahan Kurikulum yang Solutif dan Komprehensif

Menurut Winarno Surakhmad (2009:67-68), lahirnya kurikulum yang menjebak (kontroversial) karena sedikitnya empat faktor sebagai berikut: *pertama*, faktor yang bersumber dari birokrasi, terutama ada harapan dan perlakuan yang berlebihan di kalangan birokrat mengenai peran kurikulum. *Kedua*, faktor yang bersumber dari penyusun kurikulum, terutama karena lemahnya dasar-dasar filosofis dan psikologis dalam penjabaran program kurikulum. *Ketiga*, faktor yang bersumber dari pelaksana kurikulum, terutama karena tingkat kompetensi dan profesionalisme yang kurang mendukung di kalangan para guru. *Keempat*, faktor yang bersumber dari ekosistem pendidikan, terutama karena tidak adekuatnya dukungan sosial dan ketersediaan infrastruktur pendidikan.

Sementara itu, unntuk menghindari dualisme (kurikulum ganda) berkepanjangan dan beragam kerumitan, barangkali perlu dipertimbangkan: *pertama*, pemerintah membuat "Pedoman Pembelajaran Sementara Masa Transisi" (kurikulum darurat, sesuai Me Mendikbud tentang "Darurat Pendidikan") atau apalah namanya Dengan demikian, tidak perlu meneruskan Kurikulum 2013 dan menerapkan Kurikulum 2006. Kedua, pemberlakuannya dimulai akhir semester genap tahun pelajaran 2014/2015 sehingga pada semester ganjil tahun pelajaran

2015/2016 semua sekolah menggunakan dasar operasi pembelajaran yang sama (Abduhzen, 2015).

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa pengembangan kurikulum yang kemungkinan berhasil lebih signifikan jika didasarkan atas dasar hasil studi yang teliti elaborasi konsep, dan bukti-bukti empiris yang ramah kepada guru. Sementara itu, untuk memperbaiki Kurikulum 2013 maka perlu dilakukan perbaikan pada aspek substansial maupun teknis implementasinya dengan studi yang teliti dan didasarkan pada data empiris yang dipercaya serta ramah kepada guru.

C. PENUTUP

Dari uraian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut: *pertama*, KTSP 2006 mengandung berbagai persoalan dari persoalan yang substansial hingga ke persoalan teknis oleh karena itu diperlukan pengembangan kurikulum baru dengan penyempurnaan sejumlah pola pikir, yaitu Kurikulum 2013.

Kedua, pengembangan Kurikulum 2013 masih merupakan kelanjutan dari kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan landasan filosofis eksperimentalisme dan rekonstruksionisme.

Ketiga, problematika dan kontroversi implementasi Kurikulum 2013, bukan sekedar persoalan teknis, seperti pengadaan buku, pelatihan guru, kepala sekolah, dan pengawas, dan lain sebagainya, tetapi juga menyangkut persoalan fundamental dan substansial, baik asumsi, argumentasi, substansi, dan implementasinya yang tak berjalan koheren.

Keempat, pengembangan kurikulum yang kemungkinan berhasil lebih signifikan jika didasarkan atas dasar hasil studi yang teliti elaborasi konsep, dan bukti-bukti empiris yang ramah kepada guru. Sementara itu, untuk memperbaiki Kurikulum 2013 maka perlu dilakukan perbaikan pada aspek substansial maupun teknis implementasinya dengan studi yang teliti dan didasarkan pada data empiris yang dipercaya serta ramah kepada guru.

Daftar Pustaka

- Ali, Mohammad.(2009). *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional*. Bandung: Imperial Bhakti Utama,2009.
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemendikbud. (2013). *Strategi Implementasi Kurikulum 2013*. Jakarta: Kemendikbud.
- Halim, Lily.(26 November 2014). “Menjadi Percontohan Kurikulum 2013” dalam *Opini*, Kompas,

- Hidayat, Sholeh.(2013). *Pengembangan Kurikulum Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Indratno (ed.), A. Feri T. (2008). *Kurikulum yang Mencerdaskan Visi 2030 dan Pendidikan Alternatif*, Cet. II, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Koesoema A, Doni.(8 Desember 2014). “Merevisi Kurikulum 2013” dalam Kompas.
- Kompas. (12 Agustus 2014a). “Kurikulum 2013: DKI Jakarta Usul Hari Sabtu Masuk Sekolah”.
- Kompas. (22 Agustus 2014e). “Kurikulum 2013: Sekolah Masih Menanti Buku Teks”.
- Kompas. (29 Desember 2014c). “Kurikulum 2013: Guru TIK Jadi Konsultan.
- Kompas. (29 Oktober 2014d). “Kurikulum 2013: Ujian, Buku Belum Jelas”.
- Kompas.(12 Agustus 2014b). “Guru Tanya tentang Kurikulum 2013 ke Guru Lain”.
- Kunandar. (2013). *Penilaian Autentik (Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan Kurikulum 2013): Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada Pers.
- Majid, Abdul. (2014). *Implementasi Kurikulum 2013: Kajian Teoritis dan Praktis*. Bandung: Interes.
- Majid, Abdul. (2014). *Pembelajaran Tematik Terpadu*, Bandung: Remaja Rosdakarya,.
- Mulyasa, E. (2006) *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Sebuah Panduan Praktis*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2013). *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Prastowo, Andi. (2015). *Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik Terpadu: Implementasi Kurikulum 2013 untuk SD/MI*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendiknas.(2011). *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa: Pedoman Sekolah*. Jakarta: Kemendiknas.
- Suara pembaruan.com, “Kurikulum 2013, Kemag Latih 140.000 Guru Madrasah”, www.suarapembaruan.com/home/kurikulum-2013-kemag-latih-14000-guru-madrasah/39819, dan diakses pada Tanggal 10 April 2014 Pukul 23.29 WIB
- Suparno, Paul.(14 Januari 2015) “Berilah Guru Kebebasan”, dalam *Kompas*.
- Surakhmad, Winarno. (2009). *Pendidikan Nasional: Strategi dan Tragedi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Tilaar, H.A.R. (2012). *Perubahan Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Tim Dosen AP UNY.(2011).*Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Tim PGRI.(2014). *Pendidikan untuk Transformasi Bangsa: Arah Baru Pendidikan untuk Perubahan Mental Bangsa*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.